

BAB I

PENDAHULUAN

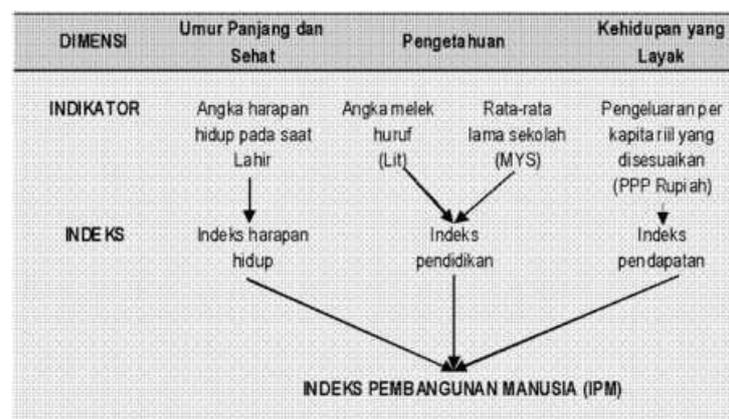
A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Salah satu tolak ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan menjadi poin utama karena berkenaan dengan kehidupan yang layak bagi setiap masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Beberapa indikator tingkat kesejahteraan yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Saat ini penggunaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan memperoleh penerimaan secara luas di seluruh dunia, bahkan telah memperoleh penerimaan pada tingkat daerah. Salah satu yang menggunakannya adalah Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik menggunakan IPM untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi dasar tersebut menggambarkan empat komponen dasar kualitas hidup, yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok hidup masyarakat yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak.¹ (Gambar I.1).



Gambar I.1

Perhitungan IPM (sumber:www.bps.go.id)

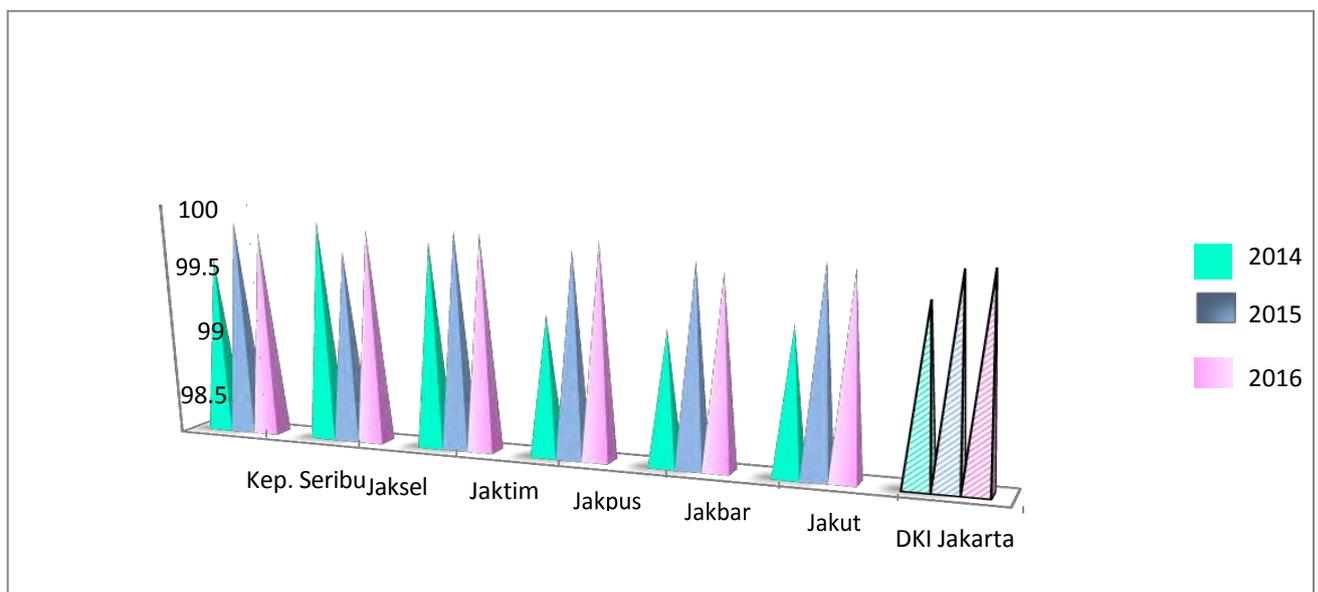
Salah satu dimensi dasar dalam capaian hidup adalah ilmu pengetahuan. Untuk meningkatkan pengetahuan, dibutuhkan pendidikan yang baik. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber manusia pada sebuah negara. Pembangunan bidang pendidikan menjadi semakin

¹ <http://www.bps.go.id>

strategis di era otonomi daerah karena daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunannya di sektor pendidikan.

Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang memanfaatkan otonomi daerah dengan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan yang multikarakteristik. Besarnya populasi penduduk dan masyarakat kurang mampu masih ditemui di perkotaan. Pelayanan sektor pendidikan untuk menjangkau masyarakat kurang mampu menjadi tantangan besar mengingat kondisi ekonomi makro yang belum kondusif.

Gambar 1.2



Angka Melek Huruf 10 tahun keatas Provinsi DKI Jakarta 2014-2016
(sumber:www.bps.go.id)

Pada data di grafik tersebut, tahun 2016, Angka Melek Huruf di DKI Jakarta mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Hampir seluruh penduduk DKI Jakarta usia 10 tahun ke atas dapat membaca dan menulis, yaitu sekitar 99,66%, meningkat 0,02% dibandingkan tahun 2015. Hanya 0,39%

atau 30.088 jiwa penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis baik huruf latin, arab maupun lainnya².

Gambar I.2 menyajikan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis menurut kabupaten/kota di DKI Jakarta. Rentang angka melek huruf dari enam wilayah kota di DKI Jakarta berkisar antara 99,44% hingga 99,76% dan persebarannya relatif merata. Tampak bahwa angka melek huruf tertinggi terdapat di Kota Jakarta Timur (99,76 %), sementara yang terendah terdapat di Kota Jakarta Barat (99,44 %). Secara keseluruhan angka melek huruf di DKI Jakarta termasuk dalam kategori tinggi dibandingkan dengan angka melek huruf di provinsi lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data tersebut bisa dikatakan angka buta huruf penduduk DKI Jakarta yang berusia 10 tahun ke atas tidak banyak, tetapi masih ada penduduk DKI Jakarta yang masih belum bisa membaca padahal DKI Jakarta merupakan Ibukota yang seharusnya seluruh penduduknya bisa membaca.

Tabel I.1
Persentase Penduduk 10 Tahun ke atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta, 2016

Statu s Pendid ikan	Laki-		Perempuan		Laki-laki Perempuan		+
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

² *Ibid.* <http://www.bps.go.id>

Tidak/Belum pernah Sekolah	34 092	0,80	91 760	2,17	125 852	1,49
Masih Sekolah	722 681	17,06	725 665	17,17	1 448 346	17,12
Sekolah Dasar	231 594	5,47	225 536	5,34	457 130	5,40
SL TP	185 380	4,38	183 577	4,34	368 957	4,36
SL TA	160 740	3,79	155 558	3,68	316 298	3,74
Diploma Universitas	144 967	3,42	160 994	3,81	305 960	3,62
Tidak Sekolah lagi	3 478 941	82,13	3 408 235	80,66	6 887 175	81,40
T O T A L	4 235 713	100,00	4 225 659	100,00	8 461 373	100,00

(Sumber: Susenas 2016)

Berdasarkan tabel tersebut, sekitar 8.461.373 jiwa penduduk DKI Jakarta yang berumur 10 tahun ke atas, 125.852 jiwa di antaranya tidak/belum pernah sekolah atau sekitar 1,49%. Sebagian besar dari penduduk yang tidak/belum pernah sekolah ini adalah penduduk perempuan, yaitu sebanyak 91.760 jiwa atau 72,91% dari total penduduk yang tidak/belum pernah sekolah. Ini memperlihatkan masih adanya preferensi gender, yang memperlihatkan kesempatan mengenyam

pendidikan bagi penduduk perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki.³

Dari seluruh penduduk usia 10 tahun ke atas, sebanyak 17,12% yang masih bersekolah dan 81,40% sudah tidak bersekolah. Jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang masih sekolah ada sebanyak 1.448.346 orang.

Untuk meningkatkan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan rintisan wajib belajar 12 tahun pada tahun 2007. Untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun tersebut, pemerintah DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) guna membantu mereka agar tetap dapat melaksanakan kegiatan di sekolah dengan baik. Khusus untuk BBPP teknis penyalurannya dilakukan dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), yaitu berupa atm bank DKI.

Menurut sumber data dari UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam penyalurannya Kartu Jakarta Pintar dilakukan dua kali tahap dengan anggaran, yaitu tahun 2014 sebanyak Rp1.341.325.520.000,00; tahun 2015 Rp2.079.621.450.000,00 dan tahun 2016 sebanyak Rp2.442.858.030.000,00. Besaran dana yang diberikan pemerintah melalui program KJP diberikan secara langsung ke siswa berupa atm DKI. Penggunaan dana KJP hanya bisa digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/gesek Bank DKI

³ *Ibid.* <http://www.bps.go.id>

atau jaringan prima (BCA), selain itu dana KJP tidak dapat ditarik tunai baik di teller maupun ATM.

Proses pemberian dana KJP diberikan rutin kepada siswa setiap tanggal 10 pada setiap bulannya. Pada awal tahun ajaran, diberikan Rp500.000,00 untuk seluruh tingkatan. Tiap bulannya besaran yang diterima siswa untuk dana KJP dibedakan berdasarkan jenjang pendidikannya dan perbedaan status sekolah. Untuk sekolah negeri, tidak ada tambahan SPP dan sekolah swasta mendapat tambahan dana untuk SPP.⁴ (Tabel I.2),

Tabel I.2

JENJANG	TOTAL ALOKASI DANA PER-BULAN	PENCAIRAN DANA RUTIN TIAP TANGGAL 10, BULAN	PENCAIRAN DANA BERKALA PER-1	TAMBAHAN SPP UNTUK SEKOLAH SWASTA PER-BULAN
SD/MI/SDLB	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 660.000	Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB	Rp 260.000	Rp 150.000	Rp 660.000	Rp 170.000
SMA/MA/SMALB	Rp 375.000	Rp 200.000	Rp 750.000	Rp 290.000
SMK	Rp 390.000	Rp 200.000	Rp 750.000	Rp 240.000

⁴ <http://www.kjp.jakarta.go.id>

PKBM	Rp 210.000	Rp 100.000	Rp 660.000	-
------	------------	------------	------------	---

(Sumber.kjp.jakarta.go.id)

Penggunaan dana KJP setiap bulannya tidak harus dihabiskan, jika dana yang diterima masih tersisa dan tidak digunakan maka dana tersebut tidak akan hangus dan akan di *autodebet* ke tabungan siswa serta dapat digunakan untuk belanja perlengkapan pendidikan tahun ajaran baru. Pengguna Dana KJP harus melapor melalui sekolah dengan melampirkan struk pembelanjaan, selain itu penerima dana KJP bisa menggunakan Trans Jakarta gratis dengan menunjukan KJP dan berseragam sekolah⁵.

Selain Pendidikan, permasalahan kesehatan di DKI Jakarta juga menjadi fokus utama pemerintah dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat 3 berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.⁶ Kesehatan adalah kebutuhan primer manusia untuk menjalankan fungsi dan peranannya sehingga mampu memperoleh kesejahteraan, dan menjadi hak bagi setiap warga Negara. Namun ketidakmerataan akses pelayanan kesehatan di setiap daerah menyebabkan tidak banyak masyarakat yang mendapatkan fasilitas pelayanan yang memadai.

⁵ *Ibid.* kjp.jakarta.go.id

⁶ Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat 3

Dengan demikian, pada tahun 2000, dikeluarkanlah konsep pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Yang kemudian di dalamnya terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu dari beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, serta bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selain itu melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau pensiun.

Sehingga untuk mendukung pelaksanaan program tersebut pemerintah membentuk suatu badan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional yang kemudian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2011 dan dirumuskan kedalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan hadir sebagai sebuah badan hukum pemerintah yang memiliki tugas khusus yaitu menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap Peserta dan/ atau anggota keluarganya. Badan publik ini terbentuk berdasarkan hasil transformasi dari PT Askes (Persero) yang pelaksanaannya mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014.

Program kesehatan di DKI Jakarta telah berjalan sejak lama. Pada tahun 2014 program kesehatan yang awalnya bernama JAMKESMAS kemudian diperbaiki dan diperbarui menjadi program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Program Kartu Jakarta Sehat ini dilaksanakan pada masa Gubernur Joko Widodo. Tidak beda dengan program sebelumnya Kartu Jakarta Sehat merupakan bentuk kepedulian pemerintah DKI Jakarta dalam bidang kesehatan untuk warga yang kurang mampu.

Pembenahan dalam bidang kesehatan terus dilakukan pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Dalam UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Sesuai dengan UU tersebut pemerintah melakukan pembenahan program BPJS Kesehatan yang semula BPJS adalah asuransi kesehatan yang hanya di tujukan kepada masyarakat yang melakukan pembayaran iuran, pada bulan Maret 2014 BPJS mengintegrasikan seluruh program kesehatan di seluruh Indonesia tidak terkecuali Kartu Jakarta Sehat menjadi BPJS Kesehatan.

Seluruh masyarakat yang mendapatkan Kartu Jakarta Sehat otomatis telah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, jika belum terdaftar dalam BPJS

Kesehatan seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di DKI Jakarta wajib mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan. Peserta dalam program BPJS ada dua tipe yaitu Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima Kartu Jakarta Sehat termasuk ke dalam Peserta PBI yang pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Peserta Non PBI diberikan pilihan pembayaran setiap bulannya sesuai dengan pelayananan ruang perawatan untuk kelas I membayar iuran sebesar Rp80.000,00, kelas II sebesar Rp51.000,00, dan kelas III Rp25.500,00.⁷

Kesejahteraan masyarakat merupakan masalah besar yang sering dihadapi pemerintah dan merupakan tombak untuk kemajuan suatu daerah. Hal ini karena kemajuan suatu daerah di ukur dari Indeks Pembangunan Manusia atau yang lebih dikenal dengan IPM. Dalam IPM, tolak ukur dari kemajuan suatu daerah meliputi berbagai aspek, yaitu kehidupan yang layak, kesehatan, dan pendidikan.

Rendahnya kehidupan yang layak dapat mempengaruhi rendahnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena apabila masyarakat dikatakan sejahtera secara otomatis pasti hidupnya layak. Selain itu, rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dapat mempengaruhi rendahnya kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat sehat maka akan mempengaruhi kualitas masyarakat itu sendiri dalam menjalankan aktifitas.

Kesejahteraan merupakan masalah yang sangat kompleks. Menurut IPM beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan salah satunya adalah angka

⁷ bpjs-kesehatan.go.id

harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, dan rata-rata lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan.

DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak, tetapi angka harapan hidup dan melek huruf masyarakat DKI Jakarta masih ada. Hal ini dapat mempengaruhi rendahnya kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

Permasalahan tingkat kesejahteraan adalah persoalan yang menarik bagi peneliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran KJP dan BPJS dalam mensejahterakan masyarakat di DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa rendahnya kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Masih terdapat buta huruf di DKI Jakarta
2. Tingkat kesehatan yang masih rendah
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan
4. Kehidupan yang layak masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa masalah kesehatan dan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena luasnya penjabaran dari masing-masing faktor dan keterbatasan

yang dimiliki peneliti dari segi dana dan waktu, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah :

“Peran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam Menyejahterahkan Masyarakat DKI Jakarta”

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara Kartu Jakarta Pintar dalam Mensejahterahkan Masyarakat DKI Jakarta?
- 2) Apakah terdapat pengaruh antara BPJS Kesehatan dalam Mensejahterahkan Masyarakat DKI Jakarta?
- 3) Apakah terdapat pengaruh antara KJP dan BPJS Kesehatan dalam Mensejahterahkan Masyarakat DKI Jakarta?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis memiliki kegunaan dalam bidang pendidikan sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi dibidang ekonomi yang terkait dengan tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan indeks pembangunan manusia, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan motivasi agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan hidup, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam mengembangkan program pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan kajian untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

d. Bagi Fakultas Ekonomi

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan koleksi berupa bahan pustaka dan bacaan bagi mahasiswa pendidikan ekonomi khususnya dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta pada umumnya.